

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

“Pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang berarti “kekuatan” dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini, konsep pemberdayaan berarti memberikan kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan, pakaian, sandang, rumah, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018) dalam (Habib, 2021:106-134).

Menurut Dwidjowijoto dalam (Bhinadi, 2017:105), pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan dalam dua pengertian. Pertama, memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau memberikan otoritas kepada orang lain. Dan kedua, upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang tetapi juga sekelompok orang. Lebih lanjut (Bhinadi, 2017:105) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses yang menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemberian berbagai kemudahan dan peluang untuk mendapatkan akses ke sistem sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan tindakan untuk meningkatkan kelembagaan desa, baik lembaga kemasyarakatan maupun lembaga fungsional serta lembaga perekonomian yang memiliki identitas desa. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, lembaga yang sehat dan kuat sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif. Selain itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan sumber daya profesional untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Maryani & Nainggolan, 2019:246) pemberdayaan masyarakat adalah proses kegiatan yang mendorong masyarakat untuk memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi mereka sendiri. Namun, masyarakat itu sendiri harus beradaptasi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Pada

dasarnya istilah pemberdayaan mencakup hal-hal seperti proses pembangunan, inisiatif masyarakat, dan perbaikan kondisi sendiri. Dengan kata lain, keberhasilan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukannya, tetapi juga oleh upaya pihak yang diberdayakan untuk memperbaiki keadaan.

Menurut Chamber (1995) dalam (Noor, 2011:87-99) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip masyarakat untuk membangun paradigma pembangunan baru yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih lanjut konsep pembangunan berdasarkan model pemberdayaan masyarakat tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mencari cara untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112) dalam (Hamid, 2018:253), yaitu:

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*), pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan dalam pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada materi, metode, waktu dan tempat yang lebih baik, dan hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat. Yang lebih penting adalah bagaimana perbaikan pendidikan nonformal melalui proses pemberdayaan dapat menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), semangat untuk belajar sepanjang hayat diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas terutama aksesibilitas terhadap sumber inovasi dan informasi, sumber dana dan keuangan, pemasok barang, peralatan, dan lembaga promosi.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*), diharapkan bahwa peningkatan pendidikan dan aksesibilitas yang lebih baik ke berbagai sumber daya (SDM, SDA, dan sumber daya buatan lainnya) akan menghasilkan tindakan yang lebih baik.

- d. Perbaiki kelembagaan (*better institution*), dengan melakukan kegiatan atau tindakan lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan masyarakat terutama dengan membangun jaringan kemitraan-usaha sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
- e. Perbaiki usaha (*better business*), diharapkan bahwa peningkatan pendidikan (semangat belajar), aksesibilitas, kegiatan, dan kelembagaan akan meningkatkan bisnis dan operasi.
- f. Perbaiki pendapatan (*better income*), perbaiki bisnis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat.
- g. Perbaiki lingkungan (*better environment*), perbaiki pendapatan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial karena kemiskinan atau kekurangan pendapatan adalah penyebab utama kerusakan lingkungan.
- h. Perbaiki kehidupan (*better living*), kehidupan setiap keluarga dan masyarakat diharapkan akan lebih baik dengan tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat.
- i. Perbaiki masyarakat (*better community*), diharapkan bahwa kondisi kehidupan yang lebih baik, didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik akan menghasilkan masyarakat yang lebih baik pula.

2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) dalam (Haris, 2014:50-62) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Kerjasama dan partisipasi, pemberdayaan masyarakat dalam prosesnya membutuhkan kerjasama yang kuat diantara berbagai bagian masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan program yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan metode yang tepat, dengan demikian metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran

kegiatan pemberdayaan sehingga metode tersebut tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga berguna dan berhasil.

- c. Demokratis, dalam melakukan pemberdayaan tujuannya adalah agar prosesnya bersifat demokratis. Ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki kesempatan yang bebas dan leluasa untuk memilih cara mana yang paling tepat untuk digunakan termasuk proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh mereka sendiri.
- d. Minat dan kebutuhan, untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien, pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada hal-hal yang menjadi prioritas utama dan terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- e. Kelompok masyarakat bawah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan program yang dibuat sebelumnya, sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat harus difokuskan pada orang-orang ditingkat akar rumput masyarakat yaitu mereka yang termasuk dalam kategori orang pinggiran.
- f. Keragaman budaya, jika pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan prinsip keseragaman budaya, dikhawatirkan akan ada persoalan dan kesulitan di lapangan.
- g. Terarah dan spesialis, tenaga fasilitator, penyuluh, dan agen pembaharu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terdiri dari individu yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu terutama untuk kegiatan yang membutuhkan tenaga spesialis untuk kegiatan yang termasuk dalam agenda pemberdayaan masyarakat.
- h. Belajar sambil bekerja, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyampaikan teori tetapi juga melibatkan kelompok sasaran secara aktif untuk mencoba melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para fasilitator. Dengan demikian, kelompok sasaran dapat bekerja sambil belajar menggunakan ide-ide yang mereka pelajari dari para penyuluh.
- i. Perubahan budaya, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan nilai budaya lokal kelompok sasaran untuk mencegah kejutan budaya (perubahan). Oleh karena itu, para penyuluh sangat diharuskan

bertindak dengan hati-hati dan memahami dengan baik nilai budaya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan.

- j. Kepemimpinan, pemberdayaan tidak seharusnya hanya menguntungkan individu tertentu seperti pelaku penyuluhan. Sebaliknya, yang diinginkan adalah bahwa kegiatan ini dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat terutama tokoh masyarakat yang ada yang diharapkan dapat membantu dalam prosesnya.
- k. Segenap keluarga, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga penyuluh harus mempertimbangkan keluarga sebagai bagian dari sistem sosial, mendorong anggota keluarga untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan.

2.1.1.4 Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Jack Rothman dalam (Juhari & Teuku Zulyadi, 2021:119-134) menjelaskan beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Pengembangan lokal, jenis ini lebih fokus pada menggerakkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat sebagai model untuk menyelesaikan masalah ketidakberdayaan masyarakat. Model ini menempatkan pekerjaan dan komponen sosial lainnya sebagai dinamisor atau pembangkit semangat untuk menggerakkan potensi yang masih terpendam.
- b. Bentuk perencanaan sosial (*social planning model*), audien dilayani dengan baik menurut bentuk ini. ketidakmampuan mereka untuk menangani masalah hidup mereka menyebabkan posisi mereka sebagai pihak yang dilayani. Namun, setiap pekerja sosial dianggap sebagai dinamisor profesional. Para penggerak ini terlatih untuk merencanakan tindakan pemberdayaan untuk kelompok sasaran seperti orang miskin renta, penyandang cacat, dan lainnya.
- c. Bentuk *social action* atau bentuk tindakan sosial berpendapat bahwa setiap masyarakat selalu memiliki berbagai potensi yang belum digunakan yang membuat proses pemberdayaan masyarakat tidak efektif. Dalam bentuk ini, asumsi yang dibangun adalah bahwa ada keterlibatan struktural dalam

proses kemiskinan masyarakat. artinya, masyarakat itu dimiskinkan dengan tujuan membuatnya tidak berdaya. Kebijakan yang dibuat seringkali tidak populis atau bermanfaat bagi masyarakat. akibatnya untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang diinginkan, *stakeholder* dan masyarakat itu sendiri harus mengambil tindakan nyata.

2.1.1.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu mikro, mezzo, dan makro Suharto (2005:66-67) dalam (Huraerah, 2008:232).

- a. Aras Mikro. Masyarakat diberdayakan secara individual melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intrevention*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih untuk menyelesaikan tanggung jawab kehidupannya. Hal ini, disebut pendekatan berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat dengan menggunakan kelompok sebagai media untuk intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif masyarakat agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Startegi ini disebut sebagai strategi besar (*large system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pendekatan ini mencakup perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Strategi sistem besar menganggap masyarakat sebagai individu yang mampu memahami situasi mereka sendiri dan menetapkan strategi yang tepat untuk mereka.

(Khoiriyah, 2019:117) juga menjelaskan ada tiga cara yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal (*enabling*). Artinya, setiap orang atau setiap

masyarakat memiliki potensi, jadi sangat penting untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki saat melakukan tindakan pemberdayaan yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat.

- b. Memperkuat kekuatan dan potensi masyarakat (*empowering*). Dengan menggunakan pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar, dan sumber daya lainnya.
- c. Pemberdayaan masyarakat berarti melindungi masyarakat (*protecting*). Ini berarti mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, seperti melalui kebersihan dan aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi yang lemah.

2.1.1.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat menurut (Hadiyanti, 2008:90-99), yaitu:

- a. Seleksi lokasi. Kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat digunakan dalam pemilihan wilayah. Kriteria ini penting untuk mencapai tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dan memastikan pemilihan lokasi dilakukan dengan baik.
- b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. kegiatan yang sangat penting untuk berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat adalah sosialisasi pemberdayaan masyarakat. proses sosialisasi membantu masyarakat memahami program dan membuat mereka lebih tertarik untuk berpartisipasi.
- c. Proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini terdiri dari kegiatan kajian keadaan pedesaan partisipatif, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta *monitoring* dan evaluasi partisipatif. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, dalam proses ini seluruhnya bekerja sama untuk menemukan dan mengkaji masalah, kemungkinan, dan peluang; membuat rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian; menerapkan rencana kegiatan kelompok; terus memantau proses kegiatan dan hasil kegiatan secara terus

menerus (*monitoring* dan evaluasi partisipatif). Setiap kegiatan sering menggunakan teknik dan alat visualisasi yang membantu proses pemberdayaan. Diharapkan bahwa teknik-teknik ini akan memungkinkan proses kajian, rencana kegiatan, penerapan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara sistematis. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah nama teknik penelitian. Tahap pemantauan dan evaluasi sangat penting karena bertujuan untuk memperbaiki proses terus menerus untuk mencapai tujuan. Proses, pencapaian, dan efek pemberdayaan adalah komponen yang diawasi dan dievaluasi.

- d. Pemandirian masyarakat. selama proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat belajar untuk menjadi mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ini berarti bahwa tim pemberdayaan masyarakat akan secara bertahap berkurang dan pada akhirnya akan berhenti berfungsi. Tugas mereka sebagai fasilitator akan diambil oleh pengurus kelompok atau individu lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. tidak ada yang tahu berapa lama pemberdayaan masyarakat akan berhasil. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang tidak akan berhenti. Seringkali kegiatan membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan dengan cepat.

2.1.1.7 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (1997:218-219) dalam (Huraerah, 2008:232) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

- a. Pemungkinan. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari batas-batas struktural dan kultural yang menghalangi pertumbuhan mereka.
- b. Penguatan. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan

- segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan. Melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
 - d. Pemeliharaan. Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.2 Pengembangan Desa Wisata

2.1.2.1 Desa Wisata

Desa wisata adalah wisata dengan suasana desa yang dinikmati oleh sekelompok wisatawan (bisa juga individu) di daerah tujuan desa dengan melihat, mengamati, ikut mengerjakan, belajar, dan membeli barang dan jasa yang tersedia di desa tersebut. Suatu perkampungan atau kawasan pedesaan yang memiliki prospek wisata yang mencakup faktor-faktor seperti daya tarik (alam, budaya, dan minat khusus), aksesibilitas, fasilitas, dan manajemen menurut Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2013:8-9) dalam (Marsono, 2019:96).

Menurut Damanik (2009) dalam (Tyas & Damayanti, 2018:74-89) pengembangan desa wisata didasarkan pada potensi yang dimiliki masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan desa wisata akan mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi berbasis masyarakat, seperti industri kerajinan, industri jasa perdagangan, dan lainnya. diharapkan hal ini akan menjadi bagian dari daya tarik desa wisata bagi wisatawan.

2.1.2.2 Tahapan Pengembangan Desa Wisata

Menurut (Suparman et al., 2023:227) tahapan-tahapan pengembangan desa wisata terdiri dari beberapa hal, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan desa wisata adalah proses membuat sebuah desa menjadi tempat wisata yang menarik bagi wisatawan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata desa secara berkelanjutan supaya masyarakat setempat dan wisatawan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang positif. Perencanaan desa wisata terdiri dari beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi potensi wisata. Ini dilakukan dengan menentukan potensi wisata desa seperti keindahan alam, budaya, sejarah, tradisi, seni, kuliner, dan kerajinan, dan lain sebagainya. Kedua, analisis SWOT. Tahap ini dilakukan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam pengembangan desa wisata. Ketiga, penentuan visi dan misi desa wisata. Tahap ini dilakukan untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan desa wisata. Keempat, perencanaan strategi. Tahap ini dilakukan untuk menentukan strategi dan rencana aksi dalam pengembangan desa wisata, meliputi pengembangan infrastruktur, promosi, pengelolaan sumber daya alam dan budaya, serta pengembangan kapasitas masyarakat setempat. Kelima, implementasi. Tahap ini dilakukan untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dalam perencanaan strategi. Keenam, evaluasi dan pemantauan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari implementasi pengembangan desa wisata, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk memastikan pengembangan desa wisata yang terencana, berkelanjutan, dan berhasil, perencanaan sangat penting.

b. Pelaksanaan

Tahapan pengembangan desa wisata dapat berbeda-beda tergantung pada sumber atau pedoman yang digunakan, tetapi umumnya ada beberapa tahapan.

Pertama, identifikasi potensi wisata yang dimiliki desa, baik alam, budaya sejarah, atau lainnya. Kedua, pemilihan lokasi atau kawasan yang akan dikembangkan sebagai desa wisata. Ketiga, pembentukan tim atau kelompok pengelola desa wisata yang terdiri dari masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Keempat, pembuatan rencana pengembangan desa wisata yang mencakup strategi pengembangan, target pasar, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta rencana anggaran. Kelima, pengembangan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan wisata, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Keenam, pengembangan atraksi wisata dan produk wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan, misalnya dengan memperkenalkan budaya lokal atau wisata alam. Ketujuh, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat setempat dalam hal pengelolaan wisata, pelayanan wisatawan, dan pengembangan produk wisata. Kedelapan, pemasaran dan promosi desa wisata ke pasar wisatawan lokal maupun internasional, melalui media sosial, *website*, atau promosi langsung ke pasar wisatawan. Kesembilan, monitoring dan evaluasi pengembangan desa wisata, untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dengan dampak positif bagi masyarakat setempat dan wisatawan.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Beberapa tahapan pemantauan dan evaluasi pengembangan desa wisata sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan desa wisata dan memberikan masukan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, mengidentifikasi indikator keberhasilan pengembangan desa wisata seperti pendapatan wisatawan, jumlah kunjungan wisatawan, kualitas produk wisata, partisipasi masyarakat lokal, dan sebagainya. Kedua, pengumpulan data. Berbagai metode seperti observasi, survei, wawancara, dan dokumentasi dapat digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk evaluasi. Ketiga, analisis data. Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengetahui kinerja dan hasil pengembangan desa wisata. Keempat, evaluasi

keberhasilan. Evaluasi dengan membandingkan kinerja yang dicapai dengan indikator keberhasilan. Hasil evaluasi dapat dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Kelima, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan pengembangan desa wisata dengan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, mengembangkan produk wisata baru, atau meningkatkan kualitas pelayanan. Keenam, monitoring. Pengawasan terus dilakukan terhadap hasil perbaikan dan pengembangan untuk mengetahui apakah ada masalah atau tantangan yang perlu ditangani. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan terencana dapat dicapai dengan memanfaatkan masyarakat setempat dan wisatawan melalui proses pemantauan dan evaluasi teratur.

Pengembangan desa wisata harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami prinsip-prinsip dan konsep dasar desa wisata, bekerja dengan jujur, totalitas, dan loyal terhadap kewajibannya. Berkaitan dengan itu menurut (Raharjo, 2019:154) ada hal-hal yang perlu dibahas, yaitu: motivasi dan penghargaan; tim kerja; pendidikan dan pelatihan.

- a. Motivasi dan penghargaan. Memberikan motivasi dan penghargaan melalui proses sosialisasi praktis tentang eksistensi dan manfaat pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; membangun komitmen bersama diantara anggota masyarakat desa bahwa lembaga desa wisata dari-kita oleh-kita dan untuk-kita; desa wisata dapat mempublikasi dan memperkuat citra desa; desa wisata dapat menjadi tujuan perjalanan; desa wisata adalah "*community based tourism*" dan "*low invesment high product*". Untuk memberikan motivasi dan penghargaan pada SDM desa wisata, desa wisata harus berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan atau mengadakan acara pemilihan desa wisata.
- b. Tim kerja desa wisata. Untuk menciptakan "rasa memiliki" masyarakat desa, tim kerja desa wisata mewakili semua bagian. Hal ini lebih disebabkan oleh fakta bahwa sebagai destinasi pariwisata yang unik dengan pola desa wisata dari-oleh-untuk masyarakat desa, lembaga usaha desa wisata harus

memiliki struktur kelembagaan yang sederhana dan fokus menyiapkan produk titik daya tarik, menyediakan fasilitas untuk wisatawan, mengemas informasi potensi kelokalan, dan membuat peta kunjungan desa (*tourist map*).

- c. Pendidikan dan pelatihan. Hal ini berkaitan dengan bimbingan teknis tentang model pengembangan destinasi pariwisata, metode pengelolaan desa wisata, metode pemanduan wisata, metode pembuatan dan penyelenggaraan paket wisata, serta metode peningkatan kualitas produk cendramata desa wisata harus diberikan kepada sumber daya manusia desa wisata.

2.1.2.3 Keberhasilan Desa Wisata

Menurut Jusuf Sudadi (T.t.) dalam (Maryani & Nainggolan, 2019:246) terdapat lima faktor dalam menentukan keberhasilan destinasi wisata, yaitu:

- a. Produk atraksi sebagai daya tarik wisata yang menarik, misalnya alam dan budaya diolah sehingga menarik (Gua Pindul, Gunung Kidul; hutan rakyat puncak Desa wisata Kalibiru. Pentas seni misalnya salawatan, angguk, dan tayub), kuliner (tempe, kripik, gethuk, wingko) dikemas dalam kemasan yang menarik dan mudah dibawa.
- b. Infrastruktur jalan (misalnya kendaraan roda empat dapat berpapasan, akan lebih baik jika bus dapat berpapasan) dan sarana komunikasi yang memadai.
- c. Fasilitas/kemudahan yang tersedia bagi pengunjung seperti penginapain/*homestay*, toilet, dan warung.
- d. Lembaga Pengelola termasuk calon lembaga pengelola yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- e. Sapta Pesona: aman, tertib, sejuk, bersih, indah, ramah, dan kenangan.

2.1.3 Kesadaran Lingkungan

2.1.3.1 Kesadaran Lingkungan

Menurut Zen (1985) dalam (Nurrachmi et al., 2019:29-34) menyatakan bahwa kesadaran lingkungan adalah upaya melibatkan setiap warga negara dalam

menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan berdasarkan tata nilai, bukan lingkungan itu sendiri dengan filosofi hidup secara damai dengan lingkungannya sendiri.

Menurut Fien (2003) dalam (Cahyaningtyas et al., 2018:146) terdapat tujuan dan pentingnya pendidikan lingkungan bagi individu, yaitu:

- a. Pengetahuan. Mempelajari banyak hal tentang menciptakan dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan untuk individu, kelompok, dan masyarakat.
- b. Kesadaran. Mendapatkan kesadaran dan memahami lingkungan secara keseluruhan serta masalah lingkungan dan pembangunan bagi individu, kelompok, dan masyarakat.
- c. Perilaku. Memperoleh berbagai nilai yang berkaitan dengan lingkungan dan dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan baik individu, kelompok, dan masyarakat.
- d. Keterampilan. Memperoleh keterampilan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan memecahkan masalah lingkungan.
- e. Partisipasi. Terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan baik individu, kelompok, dan masyarakat.

2.1.3.2 Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan

Pengelolaan sampah mencakup semua tindakan yang diambil untuk menangani sampah dari awal produksi hingga pembuangan akhir dan secara umum kegiatan pengelolaan sampah termasuk pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir Sehati (2004) dalam (Suryani, 2014:71-84).

Menurut (Kahfi, 2017:12-25) pengelolaan sampah di beberapa negara biasanya dimulai dari rumah tangga dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Ini dilakukan dengan menggunakan wadah yang berbeda yang biasanya ditandai dengan simbol warna tertentu dan wadah yang digunakan harus dapat didaur ulang. Di Indonesia keberadaan konsep ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 poin 5 disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dan dinyatakan kembali melalui Pasal 19 bahwa pengelolaan sampah dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah tertulis dalam pasal 22 ayat (1) kegiatannya meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Menurut undang-undang tersebut pendekatan yang dimaksud adalah pengelolaan dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R yang terdiri dari kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan pendauran ulang (*recycle*). Diharapkan 3R dapat berfungsi sebagai metode pemecahan untuk mengatasi masalah keterbatasan daya dan volume timbulan/timbunan sampah yang tinggi di TPS (Tempat Penampungan Sementara). Sebab telah diketahui bahwa penanganan sampah yang kurang tepat dapat mengancam keindahan kota, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2008).

Sikap pelestarian lingkungan hidup adalah suatu bentuk evaluasi perasaan dan kecenderungan untuk bereaksi dalam upaya memelihara, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam dari tekanan perubahan atau

efek negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu agar sumber daya alam tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga manusia dapat hidup untuk generasi berikutnya. Sumber daya buatan, alam hayati, atau non-alam. Konsep ini akan memungkinkan kita untuk bertindak lebih bijaksana terhadap lingkungan kita (Darmawan & Fadjarajani, 2016:37-49).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Tony Pathony yang berjudul “Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang”, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih besar digunakan untuk mengungkapkan masalah dalam kehidupan kerja pengamatan organisasi pemerintah, wawancara, studi kepustakawanan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan teori menurut Edi Suharto bahwa pemberdayaan sebagai proses. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan keluarga sejahtera di Kabupaten Subang belum optimal. Hasil penelitian dilapangan yaitu menilai pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan belum dinilai sesuai dengan teori yang digunakan.

2.2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Subekti, Yanti Setianti, dan Hanny Hafiar yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif untuk dapat menggambarkan kondisi awal lingkungan hidup, peran pemerintah,, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup di Desa Margalaksana mulai memperlihatkan hasil yang positif. Kelompok kerja memanfaatkan sumber daya lingkungan sebagai faktor utama mereka dalam pelaksanaannya, yaitu memanfaatkan sumber daya alam dari Waduk

Cirata. Modal manusia ditandai dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mampu memberikan motivasi dan dapat mengembangkan pemberdayaannya serta berdampak secara signifikan pada kemandirian masyarakat.

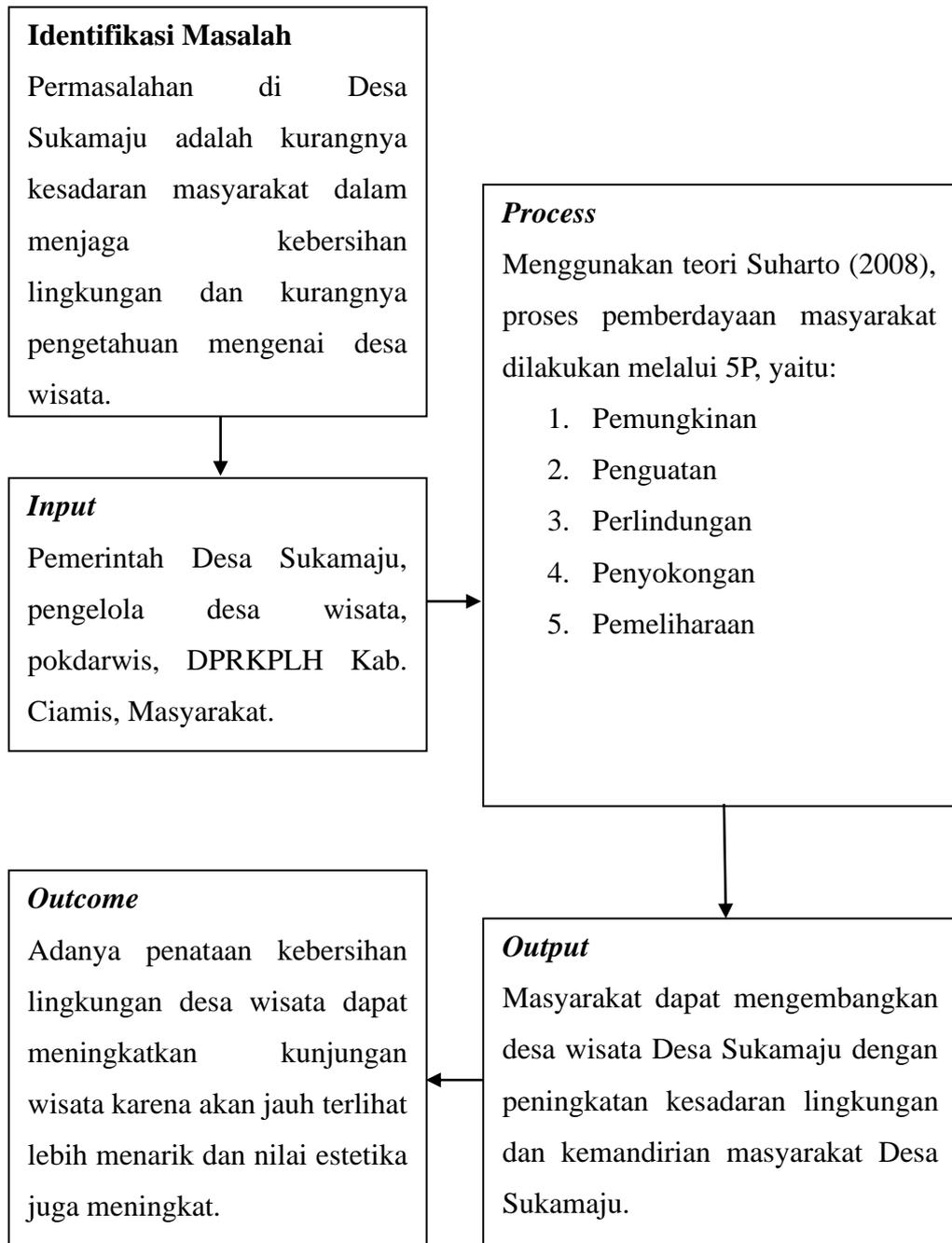
2.2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh A. A. Nyoman Sri Wahyuni yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Nyambu Kediri, Tabanan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pemberdayaan masyarakat Desa Nyambu dalam menunjang DWE dan pengembangan desa wisata di Desa nyambu Kediri, Tabanan. Hasil penelitiannya yaitu pembentukan DWE Desa Nyambu diawali dengan pemberdayaan masyarakat Desa Nyambu yang dilakukan dengan memberikan pelatihan yang dapat mendukung perkembangan DWE Desa Nyambu dari tahun 2015-2017. Perkembangan DWE Desa Nyambu tidak lepas dari peranan *stakholder* sehingga membuat Desa Nyambu memiliki daya tarik wisata, seperti *something to see* (Susur Sawah, Susur Budaya, menyaksikan pagelaran seni tari dan drama), *something to do* (Susur Desa Bersepeda dan Melukis) dan *something to buy* (sabun natural dan olahan belut), meski belum optimal.

2.3 Kerangka Konseptual

Desa sukamaju memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Akan tetapi dalam proses pengembangan desa wisata menjadi desa wisata maju memerlukan beberapa syarat agar terpenuhi salah satunya kebersihan.

Permasalahan di Desa Sukamaju adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kurangnya pengetahuan mengenai desa wisata. Hal ini penting dalam mendukung pengembangan desa wisata Desa Sukamaju. Selain dari potensi alam, sumber daya manusia juga perlu perhatian. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan perlu adanya dukungan dari beberapa pihak seperti dari pemerintah desa, pengelola desa wisata, pokdarwis, DPRKPLH Kab. Ciamis, Masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui peningkatan kesadaran lingkungan yang mengacu pada teori Suharto yang menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Masyarakat dapat mengembangkan desa wisata Desa Sukamaju dengan peningkatan kesadaran lingkungan dan kemandirian masyarakat Desa Sukamaju adalah *output* dari penelitian ini. Yang nantinya *outcomenya*, Adanya penataan kebersihan lingkungan desa wisata dapat meningkatkan kunjungan wisata karena akan jauh terlihat lebih menarik dan nilai estetika juga meningkat.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui peningkatan kesadaran lingkungan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis?